

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dipaparkan oleh penulis mengenai obyek penelitian yang akan diteliti, yaitu Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

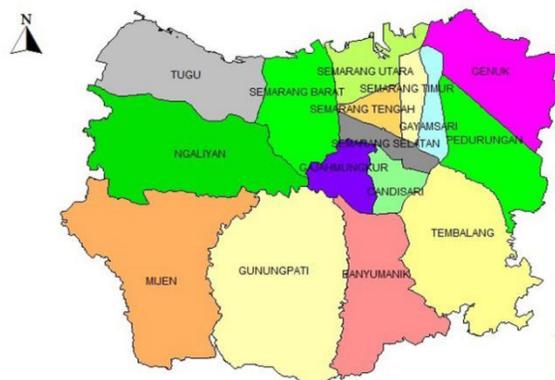
#### 1.1 Kota Semarang

##### 2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang mempunyai wilayah seluas 373,70 km<sup>2</sup> (RPJMD, 2016) dengan bagian barat Kabupaten Kendal, selatan Kabupaten Semarang, timur Kabupaten Demak serta utara Laut Jawa. Semarang terdiri atas 16 kecamatan & 177 kelurahan.

**Gambar 2.1**

**Peta Kota Semarang**



*Sumber : Bappeda Kota Semarang*

Semarang berdasarkan letak astronomisnya berada pada garis  $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10' \text{LS}$  dan garis  $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50' \text{BT}$  dengan luas daerah sebesar  $373,70 \text{ km}^2$  yang terdiri atas  $37,90 \text{ km}^2$  (10,14%) lahan sawah dan  $335,81$  (89,86 %) bukan lahan sawah. Dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Semarang adalah bagian dari wilayah strategis nasional melalui julukan KEDUNGSEPUR yaitu Kabupaten Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang berperan sebagai pusat aktivitas perdagangan, jasa, industri dan pendidikan di daerah KEDUNGSEPUR ini.

**Tabel 2.1**

Luas Kecamatan Kota Semarang Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Presentase
1.	Mijen	57.55	15.40
2.	Gunungpati	54.11	14.48
3.	Banyumanik	25.69	6.87
4.	Gajah Mungkur	9.07	2.43
5.	Semarang Selatan	5.93	1.59
6.	Candisari	6.54	1.75
7.	Tembalang	44.20	11.83
8.	Pedurungan	20.72	5.54
9.	Genuk	27.39	7.33
10.	Gayamsari	6.18	1.65
11.	Semarang Timur	7.70	2.06

12.	Semarang Utara	10.97	2.94
13.	Semarang Tengah	6.14	1,64
14.	Semarang Barat	21.74	5.82
15.	Tugu	31.78	8.50
16.	Ngaliyan	37.99	10.17
	Kota Semarang	373.70	100.00

Sumber : Diolah peneliti dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2019

Selain menjadi pusat aktivitas manusia bagi daerah KEDUNGSEPUR, Kota Semarang adalah bagian dari segitiga pusat perkembangan daerah JOGLOSEMAR bersama wilayah Yogyakarta & Solo. Pada perkembangan selanjutnya Kota Semarang tumbuh menjadi kota niaga & jasa di mana kedua aktivitas inilah yang menjadi aktivitas utama dalam menopang pembangunan Kota Semarang untuk mewujudkan kesejahteraan warga Kota Semarang.

### **2.1.2 Kondisi Demografi**

Yang merupakan permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan ialah permasalahan penyebaran penduduk yang masih tidak rata. Daerah yang memiliki jumlah masyarakat yang banyak mempunyai berbagai masalah kompleks misalnya saja banyak pengangguran, lahan yang kurang, kemiskinan, kebutuhan dasar serta fasilitas umum yang kurang memadai misalnya untuk fasilitas kesehatan, pendidikan serta berbagai permasalahan sosial yang lainnya. Kota Semarang sebagai ibukota prov Jateng jadi wajar saja memiliki jumlah penduduk yang padat. Merujuk pada hasil yang sudah dikelolah lembaga

berelasi bersama demografi, disemarang periode 2020 terekam sejumlah 1,680,417 dengan rincian 831,757, adalah warga pria sedangkan 848,660 adalah warga wanita yang tersebar di 16 kecamatan di Semarang.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah warga Semarang periode 2016-2020**

No.	Periode	Jumlah
1.	2016 (Desember)	1,648,279
2.	2017 (Desember)	1,658,552
3.	2018 (Desember)	1,668,578
4.	2019 (Desember)	1,674,358
5.	2020 (Juni)	1,680,417

Sumber : DISDUKCAPIL Semarang Kota 2020.

Berdasarkan data jumlah penduduk dan kepadatan penduduk kota Semarang dari 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Seiring peningkatan jumlah penduduk ini mengimplikasikan bahwa jumlah tenaga kerja juga meningkat. Kebutuhan warga Semarang terhadap lapangan pekerjaan juga semakin besar.

### **2.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi Kota Semarang**

Kota Semarang memiliki tingkat keikutsertaan angkatan kerja yang terbilang cukup tinggi, laki-laki & perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam dunia pekerjaan, hal tersebut diperkuat data dari (BPS, 2020) yang menunjukkan

bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja bagi laki-laki di Kota Semarang telah mencapai 77,79 sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 54,09. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar warga Kota Semarang telah memiliki pekerjaan dan berkontribusi aktif pada pembangunan ekonomi di Kota Semarang. Sementara itu, berdasarkan tabel 2.3 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Semarang terbilang sudah sangat kecil yaitu 6,84 bagi laki-laki dan 3,20 untuk perempuan.

**Tabel 2.3**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kota Semarang Tahun 2019

No	Kegiatan Utama	Pria	Wanita	Total
1.	Angkatan Kerja	528.805	422.330	951.135
2.	Bekerja	507.008	400.929	907.937
3.	Pengangguran terbuka	21.797	21.401	43.198
4.	Bukan Angkatan Kerja	164.609	316.150	480.759
5.	Sekolah	83.288	91.591	174.879
6.	Mengurus rumah tangga	38.973	206.128	245.101
7.	Lainnya	42.348	18.431	60.779
<b>Jumlah</b>		<b>693.414</b>	<b>738.480</b>	<b>1.431.894</b>
Tingkat partisipasi angkatan kerja		77,79	54,09	65,56
Tingkat pengangguran terbuka		6,84	3,20	5,29

Sumber : Data diolah peneliti dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun

Pada tabel 2.3 mengenai Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kota Semarang Tahun 2019 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja pria lebih banyak daripada angkatan kerja wanita yaitu sebesar 528.805 bagi laki-laki dan 422.330 bagi perempuan. Meskipun jumlah angkatan kerja di Kota Semarang terbilang tinggi sebesar 951.135 namun jumlah tersebut sudah sebanding dengan jumlah penduduk yang sudah bekerja sebesar 907.937. Ini artinya selisih antara angkatan kerja yang sudah bekerja dengan angkatan kerja yang belum bekerja terbilang cukup sedikit. Dengan tingkat penangguran terbuka sejumlah 43.198. Bukan angkatan kerja sebesar 480.759 yang masih sekolah sebesar 174.87 dan mengurus rumah tangga sebesar 245.101. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa seiring besarnya jumlah angkatan kerja di Kota Semarang, jumlah penduduk yang sudah bekerja juga sudah besar. Hal tersebut dapat bermakna bahwa kesejahteraan ekonomi bagi penduduk di Kota Semarang sudah cukup baik.

## **2.2 Dinas Sosial Kota Semarang**

### **2.2.1 Profil**

Kantor Dinas Sosial Kota Semarang beralamat di Jl. Pemuda No.148, Sekayu. Kec. Semarang Tengah, dinas sosial kota semarang ialah perangkat daerah yang memegang kepentingan pemerintah dalam bidang sosial. Dalam menjalankan fungsinya dinsos diuntut untuk selalu menjadi motor dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat kota semarang.

Meningkatkan dan memberikan pelayanan sosial sehingga mewujudkan warga semarang sejahtera dan berdaya.

### **2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang. Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut dinsos semarang menjalankan fungsi sebagai berikut :

- 1) merumuskan kebijakan
- 2) merumuskan Rencana, Perumusan rencana strategis sesuai visi misi Walikota
- 3) Pengkoordinasian Tugas-Tugas,
- 4) Penyelenggaraan Pembinaan,
- 5) Penyelenggaraan Penyusunan,

- 6) Penyelenggaraan Kerjasama,
- 7) Penyelenggaraan kesekretariatan,
- 8) Penyelenggaraan Program dan Kegiatan,
- 9) Penyelenggaraan Penilaian
- 10) Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan,
- 11) Melakukan pelaporan,
- 12) melaksanakan fungsi lain.

### **2.2.3 Struktur organisasi**

Sesuai dengan peraturan walikota semarang no. 68/2016 diketahui susunan organisasi dinas sosial kota semarang sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Dinsos Kota Semarang**



Sumber : dinas sosial.go.id

berdasarkan gambar 2.2 diatas dapat diketahui struktur dinas sosial kota semarang sebagai berikut : 1. Kepala Dinas, 2. Sekretariat 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 4. Bidang Rehabilitas sosial 5. Bidang perlindungan dan jaminan sosial 6. Bidang penanganan fakir miskin 7. **UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo** 8. **Unit Tata Usaha**

## 2.3 Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

### 2.3.1 Profil

Dinas tenaga kerja ( DISNAKER) kota semarang beralamat di Jl. Mangunsarkoro No.21, Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah. Dinas

tenaga kerja kota semarang menjadi motor penggerak dan melayani masyarakat kota semarang dalam memenuhi kebutuhan urusan yang berkaitan dengan ketenga kerjaan. Disnaker kota semarang sebagai implementor merupakan pihak utama dalam menentukan hubungan industrial dan perlindungan terhadap pengusaha maupun pekerja.

### **2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Disnaker Kota Semarang mempunyai tugas pokok “Melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi”. dalam menjalankan tugas poko tersebut disnaker kota semarang memiliki fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi
3. Pembinaan pencari kerja, perlindungan pekerja, syarat -syarat kerja, kesejahteraan pekerja pada sektor informal dan penyelenggaraan transmigrasi
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Daerah

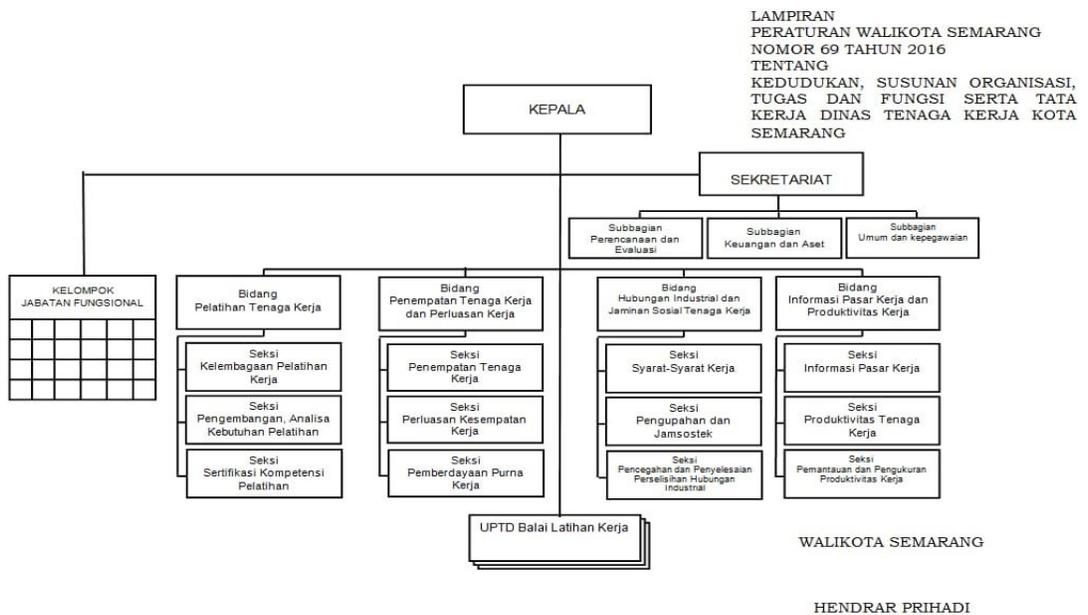
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota

### 2.3.3 Struktur organisasi

Secara organisasi Dinas Tenaga Kerjai Kota Semarang berada dibawah Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

**Gambar 2.3**

Struktur organisasi DISNAKER Semarang Kota



Sumber : [semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui susunan struktur organisasi disnaker semarang kota yakni :

1. Kepala dinas
2. Sekretariat
3. Bidang pelatihan
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kerja
5. Bidang hubungan industrial
6. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja
7. UPDT
8. Jabatan Fungsional.

## **2.5 Gambaran Umum Disabilitas Kota Semarang**

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami kesulitan berinteraksi secara normal atau penuh dalam bermasyarakat akibat dari kelainan atau keterbatasan fisik, maupun non fisik pada dirinya. Keterbatasan ini bisa bawaan dari lahir dan bisa juga terjadi karena kecelakaan kerja serta penggunaan obat atau tekanan masalah hidup. Adanya perubahan indikator kesehatan, perubahan indikator kesejahteraan sosial hingga berubahnya defisini operasional tentang disabilitas di indonesia menyebabkan sulitnya untuk menemukan data yang persis dan akurat mengenai disabilitas di indonesia. Begitupun kota semrang, data tentang disabilitas masih sulit untuk ketahui secara persis berapa jumlahnya jenis kecacatannya serta dimana mereka bekerja. Disabilitas masih dianggap orang cacat yang tidak bisa diadalkan serta menjadi aib sehingga orang tua

cenderung malu dan menyembunyikan anak dan saudara mereka yang disabilitas padahal tidak semua disabilitas yang biasanya hanya menjadi beban, jika dilatih dan dikembangkan bahkan bisa lebih berprestasi dari pada orang normal.

Jumlah penyandang disabilitas Kota Semarang berdasarkan rekap data penyandang disabilitas hasil pendataan dinas sosial dan TAD tahun 2019 terdapat 5.712, penyandang disabilitas laki-laki yakni 2921 orang dan perempuan sebanyak 2790 orang serta penyandang disabilitas anak terdapat 1.123 orang dan penyandang disabilitas dewasa sebanyak 4.585 orang.

Di Indonesia sudah terdapat UU No 8 tahun 2016 tentang disabilitas juga Jawa Tengah sendiri sudah ada Peraturan daerah Jawa Tengah No 11/2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 11/2017 yang mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Meski sudah ada aturan yang jelas di provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang masih belum memiliki perwal tentang ini sehingga terjadi simpang siuran dan tupoksi bagian yang tidak jelas tentang siap yang memiliki wewenang yang khusus menangani disabilitas. fakta ini dibuktikan dengan pernyataan bu tri rejeki dinas sosial yang menyatakan bahwa urusan dinas sosial terhadap penyandang disabilitas hanya sebatas rehabilitasi, sedangkan untuk ketenagakerjaan di atur oleh dinas tenaga kerja Kota Semarang, namun pernyataan dari bapak nanuk bidang penempatan tenaga kerja menyebutkan bahwa kewenangan disabilitas sudah ditarik oleh provinsi, karena biasanya polisi

untuk pengawasan yang ada di disnaker sudah ditarik oleh provinsi jadi disnaker Kota Semarang tidak memiliki data yang yang akurat mengenai ketenagakerjaan disabilitas Kota Semarang. fakta ini juga berlawanan terbalik dengan pernyataan bu nunung dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa tengah yang mengatakan hanya memiliki data keseluruhan dan untuk mendetail seharusnya dipegang oleh disnaker Kota Semarang itu sendiri.